



**NOTA KESEPAHAMAN  
ANTARA  
BADAN PENGAWAS PEMILU KOTA TANJUNGBALAI  
DAN  
STAI AL-HIKMAH KOTA TANJUNGBALAI  
TENTANG  
PENGEMBANGAN KERJASAMA TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI**

Nomor :2001/PM.04/K.SU/09/2021

Nomor : 98/STAIA-TB/2021

Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Kuasa dan didasari keinginan bersama untuk saling menunjang pembangunan bangsa, pada hari ini Senin tanggal dua puluh bulan September tahun dua ribu dua puluh satu (20 – 09 – 2021), kami yang bertandatangan di bawah ini:

- 1. Dedy Hendrawan, SH.,MH** : Dalam jabatan selaku Ketua Badan Pengawas Pemilihan Kota Tanjungbalai, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Tanjungbalai, yang berkedudukan di Jalan Sudirman, K.m 3.5, Kelurahan Pahang, Kecamatan Datuk Bandar, Kota Tanjungbalai, untuk selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
- 2. Boyke Azwar, M.Pd.I** : Dalam jabatan selaku Ketua STAI AL-HIKMAH Kota Tanjung Balai dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama STAI AL-HIKMAH Kota Tanjungbalai, yang berkedudukan di Jalan Karya, Kelurahan Karya, Kecamatan Tanjungbalai Selatan, Kota Tanjungbalai, untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama untuk selanjutnya disebut **PARA PIHAK**, dan secara terpisah disebut **PIHAK**.

**PARA PIHAK** sepakat untuk menjalin kerja sama, yang selanjutnya disebut Nota Kesepahaman dengan ketentuan sebagai berikut.

## **TUJUAN**

Dengan tetap mengindahkan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi kedua belah pihak, naskah Nota Kesepahaman ini dibuat dengan tujuan untuk memanfaatkan sumber daya yang dimiliki oleh PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA untuk saling membantu dalam penyelenggaraan pendidikan dan pengajaran, penelitian, dan pengembangan, serta pengabdian kepada masyarakat, dan hal-hal lain yang dianggap perlu, serta saling mendukung dalam pelaksanaan tugas dan fungsi PARAPIHAK sesuai dengan kewenangannya masing-masing.

## **PASAL 2 RUANG LINGKUP**

Nota Kesepahaman ini meliputi:

1. Bidang Penelitian;
2. Bidang Pelatihan;
3. Bidang Pemanfaatan Sarana dan Prasarana;
4. Bidang Pemanfaatan Sumberdaya;
5. Pengawasan Partisipatif dan meningkatkan partisipasi masyarakat Kota Tanjungbalai;
6. Pendidikan tentang Kepemiluan dan Pemilihan kepada masyarakat Kota Tanjungbalai;

## **PASAL 3 PELAKSANAAN KEGIATAN**

Pelaksanaan Nota Kesepahaman secara rinci dalam bidang-bidang tertentu akan disusun dan dituangkan dalam naskah Perjanjian Kerja Sama tersendiri yang dilaksanakan oleh pejabat yang diberi tugas/kuasa oleh masing-masing pihak dan merupakan bagian dari satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

## **PASAL 4 PEMBIAYAAN**

Anggaran biaya yang ditimbulkan untuk melaksanakan Nota Kesepahaman ini secara rinci akan diatur dalam ketentuan tersendiri.

## **PASAL 5 HAK DAN KEWAJIBAN**

Hak dan kewajiban PARA PIHAK ini akan dimusyawarahkan bersama sesuai dengan bentuk dan jenis kegiatan yang akan dilaksanakan.

## **PASAL 6 JANGKA WAKTU**

Nota Kesepahaman ini berlaku sejak tanggal penandatanganan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, dan akan ditinjau kembali atau diperpanjang sesuai dengan kesepakatan PARA PIHAK.

## PASAI 7

### PENYELESAIAN PERSELISIHAN

1. Perselisihan yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, akan diselesaikan oleh PARA PIHAK secara musyawarah dan mufakat.
2. Apabila penyelesaian musyawarah dan mufakat tidak dapat dicapai, maka keputusan kesepakatan dapat dilakukan secara sah cukup dengan pemberitahuan dari PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA dan atau sebaliknya dalam bentuk tertulis dalam kurun waktu selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari.
3. Apabila terjadi keputusan kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 (dua) maka rancangan program yang sedang berjalan dapat diteruskan sampai selesai jika disetujui oleh PARA PIHAK.

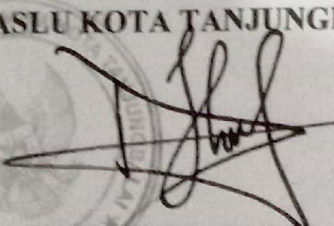
## PASAL 8

### LAIN-LAIN

1. Apabila terjadi hal-hal di luar kekuasaan PARA PIHAK atau keadaan memaksa (*force majeure*) dapat dipertimbangkan kemungkinan perubahan tempat dan waktu pelaksanaan tugas pekerjaan atas persetujuan PARA PIHAK.
2. Yang termasuk keadaan memaksa (*force majeure*):
  - a. bencana alam;
  - b. tindakan pemerintah di bidang fiskal dan moneter; dan
  - c. keadaan keamanan yang tidak mengizinkan.
3. Segala sesuatu yang dipandang perlu tetapi belum tercantum di dalam naskah Nota Kesepahaman ini akan diatur lebih lanjut secara bersama oleh PARA PIHAK.
4. Nota Kesepahaman ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) masing-masing ditandatangani di atas meterai cukup dengan kekuatan hukum yang sama.

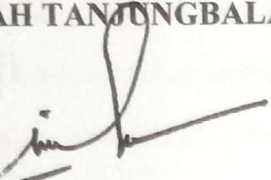
PIHAK PERTAMA

BAWASLU KOTA TANJUNGBALAI

  
DEDY HENDRAWAN, SH.,MH  
KETUA

PIHAK KEDUA

STAI AL-HIKMAH TANJUNGBALAI

  
BOYKE AZWAR, M.Pd.I  
KETUA